ELAIEM DI MALUKU
(Mengelola Kerukunan dari Akar Rumput)

ARIFUDDIN ISMAIL

Abstrak

Penelitian ini adalah penelitian evaluatifterhadap keberadaan dan cara kerja lembaga-lembaga kerjasama antar umat beragama dalam membina kerukunan di Kota Ambon. Data diperoleh melalui teknik penjaringan data sesuai dengan konteks data yang dicari. Data primer akan dijaring melalui teknik wawancara dan pengamatan. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dengan kategorisasi dan pengelompokan sesuai dengan jenis data. Kemudian dilihat hubungan-hubungan antar fakta yang ada untuk membantu melakukan interpretasi dan analisis. Teknik analisisnya digunakan anaisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa sejak masuknya agama-agama samawi ke wilayah Maluku, konflik antara pemeluk agama telah terjadi berulang kali. Kenyataan sampai saat ini takpernah mencapai suatu titik penyelesaian yang permanent, dari realitas tersebut, maka Gereja Protestan Maluku (GPM), Majelis Ulama Indonesia (Mill) Wilayah Maluku, dan Keuskupan Ambonia, guna menjawab tuntutan tanggung jawab itulah maka ketiga lembaga resmi agama ini menyepakati sebuah prakarsa bersama untuk membentuk Lembaga Antar Iman untuk Kemanusiaan Maluku yang disingkat el AI eM. el AI eM dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Maluku, dimana lembaga ini adalah hasil dari prasakarsa masyarakat. menurut menuturan responden, bahwa lembaga-lembaga yang muncul butten up *akan lebih bermanfaat bila dibandingkan lembaga yang dibentuk* top dawn.

I. PENDAHULUAN

Salah satu program Pemerintah, Departemen Agama RI, dalam meningkatkan kerukunan hidup di antara sesama umat beragama adalah membentuk suatu wadah Musyawarah antar umat beragama atau Lembaga Kerjasama Antar Umat Beragama (LKAUB). Wadah tersebut berupa sebuah forum konsultasi dan komunikasi antar pemimpin-pemimpin/ pemuka-pemuka agama dan antara pemimpin-pemimpin/pemuka-pemuka

agama dengan pemerintah. Bentuk badan tersbut adalah pertemuan-pertemuan yang diadakan sewatu-waktu sesuai dengan keperluan, baik atas undangan pemerintah atau mejelis agama. Wadah musyawarah sesuai dengan namanya ialah sebagai forum musyawarah, forum konsultasi dan komunikasi. Badan ini membahas berbagai hal yang berkaitan dengan tanggung jawab bersama dan kerjasama di antara warga negara yang menganut berbagai agama untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Aplikasi dari program tersebut, maka di beberapa daerah telah dibentuk wadah-wadah serupa. Pada tingkat provinsi dibentuk wadah serupa dan penamaannya diserahkan kepada daerah masing-masing, seperti FKPA di Medan Sumatra Utara, FOKUSS di Sumatera Selatan, BKSAUA di Manado Sulawesi Utara, dan lain-lain. Spesifikasi dari forum atau lembaga kerjasama adalah menghimpun wakil dan unsur-unsur umat beragama untuk membicarakan tanggung jawab bersama dan membangun kerjasama di antara para warga negara yang berbeda agama.

Seiring dengan tugas-tugas lembaga kerjasama lintas agama di atas, dimaksudkan juga sebagai penyambung konsep-konsep kebijakan pembangunan dan pemelihara kerukunan umat beragama dari pemerintah, seperti "pembangunan wawasan multikultural" serta dengan pendekatan yang bersifat *buttom up.* Hasil dari ini, masyarakat diharapkan mempunyai kesadaran tidak hanya mengakui perbedaan, tetapi mampu hidup saling menghargai, menghormati secara tulus, komunikatif dan terbuka, tidak saling mencurigai, memberi tempat terhadap keragaman keyakinan, tradisi adat dan budaya, dan yang paling utama adalah berkembangnya sikap tolong-menolong sebagai perwujudan rasa kemanusiaan dan ajaran agama masing-masing (Mudzhar, 2004:17-18).

Hanya disayangkan karena kerawanan sosial yang merambah ke persoalan SARA muncul ke permukaan sejak tahun 1997 atau akhir Orde Baru dan hingga sekarang secara bergantian timbul di berbagai daerah di nusantara. Menurut Atho Mudzhar (2004:19) di sinilah sebenarnya arti penting keberadaan dan peranan intitusi pemerintah dan organisasi lembaga keagamaan untuk membina masyarakat yang sering diperhadapkan pada problema kemajemukan. Jadi, salah satu misi forum atau lembaga kerjasama sebagai institusi kemasyarakatan adalah untuk mengakomodir dan menjembatani kepentingan umat beragama itu sendiri maupun yang dimunculkan oleh pihak-pihak tertentu guna dicarikan solusinya, sehingga tercipta kedamian dan kerukunan umat beragama.

Atas dasar itulah sangat menarik perhatian untuk menelusuri lebih jauh Eksistensi dan Efektifitas Lembaga Kerjasama Antar Uamt Bergama di berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia dalam mengembangkan misinya membina kerukunan umat beragama.

Penelitian ini betujuan untuk melakukan evaluasi terhadap eksistensi dan efektifitas lembaga-lembaga kerjasama antar umat beragama di beberapa Provinsi Maluku. Karena itu penelitian ini bermaksud untuk: menemukan suatu lembaga kerjasama antar umat beragama di Ambon; menelusuri program yang direncanakan selama terbentuknya; menelusuri gejolak sosial dan konflik yang ditangani selama ini, menelusuri imbasnya terhadap pemeliharaan dan pembinaan kerukunan umat beragama secara luas. Hasil penelitian nantinya diharapkan dapat melahirkan rumusan yang bisa dijadikan bahan masukan bagi Menteri Agama RI dan pihak Pemerintah Daerah (Pemda) dalam rangka penataan Lembaga Kerjasama Antar Umat Beragama baik di tingkat pusat maupun daerah.

II. LANDASAN TEORI DAN BATASAN KONSEP

Pertanyaan mendasar yang diajukan dalam konteks penelitian ini adalah sejauhmana peran lembaga kerjasama antar umat beragama dalam proses penyelesaian masalah-masalah sosial yang berhubungan dengan kehidupan antar umat beragama. Ada dua teori di antara sekian teori yang bisa dipakai dalam rangka menganalisis femomena tersebut.

Pertama, Teori Fungsionalisme. Fungsionalisme sebagai persfektif teoritik bertumpu pada analogi dan organisme. Artinya, ia membawa kita memikirkan sistem sosial budaya sebagai sebuah organisme, yang bagian-bagiannya tidak saja saling berhubungan melainkan juga memberi andil dalam pemeliharaan, stabilitas dan kelestarian organisme. Dengan demikian, maka dasar semua penjelasan fungsional di atas terletak pada asumsi, bahwa sistem budaya atau sosial memiliki syarat-syarat fungsional tertentu untuk memungkinkan eksistensinya (Kaplan, 200:77-78). Salah satu proposisi yang paling penting dari Fungsionalisme (Bisri, 2002; 113) adalah bahwa suatu sistem akan selalu ada proses reorganisasi dan kecenderungan untuk menciptakan keseimbangan. Dalam konteks Teori Fungsional ini, Lembaga Antar Umat Beragama dapat dianggap memiliki eksistensi jika ia memiliki fungsi dalam rangka memelihara dan menstabilisasi hubungan antar umat beragama.

Kedua, Teori *Social Engenering* (Rekayasa Sosial). Teori ini memandang bahwa persoalan sosial seperti konflik antar umat beragama tidak lahir secara alamiyah tetapi dikonstruksi oleh sebuah kekuasaan atau kekuatan tertentu. Seluruh fenomena sosial adalah hasil dari rekayasa tertentu. teori ini melihat bahwa institusi (negara, agama, dan kapital) tidak hanya membuat kebijakan tertentu mengenai perkembangan sosial tetapi juga menentukan pergerakan realitas sosial (Rahmat, 2000). Berdasarkan teori ini, sebuah Lembaga Kerjasama Antar Umat Beragama dianggap efektif dan eksis jika ia berhasil mengelola dan mengkonstruksi masyarakat ke arah yang baik dengan mengandalkan kekuatan yang dimiliki.

Secara umum ada dua unsur yang perlu dicermati dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Pertama: Eksistesi dan Efektifitas Lembaga Kerjasama Antar Umat Beragama. Adapun yang dimaksud di sini adalah keberadaan institusi atau lembaga kerjasama yang dibentuk untuk menghimpun wakil-wakil umat beragama dalam upaya menjembatani kepentingan umat beragama. Pembahasan menyangkut persoalan ini tentu dimulai dari pemahaman yang terkait dengan konsep-konsep.

1. Eksisitensi: konsep ini dimaknakan sebagai lembaga yang meliputi proses awal berdirinya, perkembangan dam dinamikanya, program-program yang dikembangkan dan segala yang terkait dengan kelambagaannya.
2. Efektivitas: konsep ini dimaknai sebagai suatu proses yang terkait dengan persoalan cara kerja yang berkembang pada lembaga-lembaga kerjasama antar umat beragama.
3. Lembaga: dimaknai sebagai wadah berhimpun bagi wakil-wakil umat beragama guna membangun kebersamaan.
4. Kerjasama: upaya saling memahami dan saling memberi sesuatu yang bernilai untuk dilakukan dalam membina dan memelihara kerukunan.
5. Umat beragama: para penganut agama yang diakui di Indonesia, yaitu umat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Chu.

Kedua, Pembinaan kerukunan: yang dimaksudkan adalah segala upaya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kerjasama antar umat beragama, baik yang bersifat rutin maupun insidenil. Untuk kepentingan opersional, beberapa konsep yang terkait dengan ini adalah:

1. Pembinaan: dimaksudkan sebagai upaya melakukan perbaikan dari apa yang ada ke arah yang lebih baik.

2. Kerukunan: dimaksudkan sebagai suatu kondisi kehidupan yang di dalamnya terjalin persatuan dn kesatuan dengan prinsip saling menghargai satu sama lain dan penuh kedamaian.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian evaluatif terhadap keberadaan dan cara kerja lembaga-lembaga kerjasama antar umat beragama dalam membina kerukunan di Kota Ambon. Karena itu sasaran penelitan ini adalah: aspek kelembagaannya, mulai dari proses pembentukannya, dinamika pertumbuhannya, program dan cara kerjanya dalam melakukan pembinaan kerukunan umat beragama yang akan diperoleh dari pengurus lembaga kerjasama antar umat beragama, tokoh agama yang terlibat dalam kepengurusan, tokoh pemuda umat beragama, tokoh perempuan umat beragama, tokoh masyarakat, cendekiawan dan akademisi serta pemerintah daerah.

Data diperoleh melalui teknik penjaringan data sesuai dengan konteks data yang dicari. Data primer akan dijaring melalui teknik wawancara dan pengamatan. Sedangkan data sekunder akan dikumpulkan melalui cara tersendiri, baik yang ada pada dokumen-dokumen, brosur-brosur, maupun realitas sosial. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dengan kategorisasi dan pengelompokan sesuai dengan jenis data. Kemudian akan dilihat hubungan-hubungan antar fakta yang ada untuk membantu melakukan interpretasi dan analisis. Teknik analisisnya digunakan anaisis deskriptif kualitatif.

IV. TEMUAN PENELITIAN

Konflik sosial yang berlangsung selama lebih kurang empat tahun di Maluku pada kenyataannya telah memperlihatkan realitas kerusakan tatanan masyarakat, struktur-struktur sosial, sistem nilai dan ikatan kekerabatan masyarakat yang terjalin selama ini. Seluruh realitas tersebut mengkondisikan masyarakat untuk hidup dalam trauma berkepanjangan, serta menjalani hidup yang terbelah/tersegregasi satu terhadap lainnya — segregasi perbedaan agama, antara Muslim dan Kristen—bukan saja secara geografis/fry *place,* tetapi juga secara kognitif/fry *mind.*

Sejak masuknya agama-agama samawi ke wilayah Maluku, konflik antara pemeluk agama telah terjadi berulang kali. Kenyataan sampai saat ini tak pernah mencapai suatu titik penyelesaian yang permanen, ketegangan antar para pemeluk agama justru mencapai titik temu ketika agama menempatkan dirinya pada bangun budaya Maluku melalui rangkaian proses inkulturasi, yang juga belum tuntas dilakukan sampai saat ini. Pada kenyataannya agama tak pernah berupaya melakukan dialog antar mereka secara sungguh-sungguh. Karenanya ketika pemicu konflik ditarik pada pelatuk agama, maka energi konflik yang terpendam menjadi tumpah ruah sebagai suatu malapetaka. Tak heran bahwa melalui konflik, tanpa sadar segregasi memperoleh bentuknya yang permanen.

Terhadap realitas dimaksud maka seluruh upaya untuk membangun secara permanen suatu proses interaksi yang terukur diantara para pemeluk agama di Maluku, menjadi sangat signifikan untuk didukung. Bertolak dari realitas dimaksud pula maka Gereja Protestan Maluku (GPM), Majelis Ulama Indonesia (MUI) Wilayah Maluku, dan Keuskupan Ambonia, telah berinisiasi untuk memulai sebuah pola hubungan yang permanen dan terukur, dengan berorientasi pada upaya bersama mengatasi dampak konflik Maluku. Guna menjawab tuntutan tanggung jawab itulah maka ketiga lembaga resmi agama ini menyepakati sebuah prakarsa bersama untuk membentuk Lembaga Antar Iman untuk Kemanusiaan Maluku yang disingkat el AI eM.

A. Sekilas tentang Forum Komunikasi Kerukunan Antar Umat Beragama (FKKAUB)

Forum Komunikasi Kerukunan Antar Umat Beragama (FKKAUB) merupakan forum yang dibentuk atas inisiatif Kanwil Dep. Agama Maluku. Pada proses pembentukannya, Kanwil Agama Prov. Maluku mengundang berbagai tokoh agama mulai dari tingkat provinsi seperti pemimpin-pemimpin lembaga keagamaan beserta beberapa pengurusnya, tokoh-tokoh agama di setiap kabupaten bahkan dari berbagai desa. Beberapa kali pertemuan yang dilakukan di Hotel Aman pada tahun 2002. Pertemuan-pertemuan tersebut melahirkan beberapa kesepakatan, antara lain adalah kesepakatan para tokoh agama untuk menghentikan konflik dan membangun kembali interaksi yang harmonis antar berbagai penganut agama. Selain itu disepakati pula untuk mengaktifkan kembali FKKAUB yang sempat vakum beberapa waktu akibat konflik. Forum ini disusun dengan formasi yang baru.

Namun setelah legalitas FKKAUB tersebut ditetapkan oleh Pemerintah bersamaan dengan ditetapkannya legalitas el AI eM, beberapa tokoh agama dan masyarakat kurang responsif. Mereka kurang setuju atas pembentukan forum yang tampaknya *top down* tersebut.

Kehendak ini dasari oleh pengalaman bahwa lembaga semacam itu (FKKAUB) telah lama dibentuk, bahkan telah ada sebelum kerusuhan melanda Ambon. Akan tetapi lembaga tersebut tidak berperan secara maksimal dalam membina kerukunan umat beragama. Hal ini disebabkan karena forum tersebut hanya sebatas mempertemukan tokoh-tokoh agama dalam suatu pertemuan sewaktu-waktu.

Menurut Indrus Latuconsina, Sekretaris MUI, bahwa kami sebetulnya tidak menolak pembentukan FKKAUB tersebut. Hanya ada pengalaman-pangalaman di saat sebelum kerusuhan terdapat suatu forum semacam itu yang dibentuk oleh pemeritah. Forum tersebut *dibackup* oleh banyak dana dan bahkan dalam bentuk proyek-proyek di Departemen Agama, akan tetapi tidak berfungsi secara maksimal dalam membina kerukunan antar umat beragama. Dapat dibanyangkan begitu banyak dana proyek yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam pembinaan tersebut akan tetapi kondisi kerukunan antar umat beragama itu membuyar dan pada saat kerusuhan. Dampak dari program-program tersebut tidak tampak. Bahkan tindakan-tindakan anarkis dan saling serang antar penganut agama yang terjadi.

Mantan Ketua STAIN Ambon tersebut lebih lanjut menjelaskan, bahwa berdasarkan kondisi-kondisi tersebut masyarakat mengambil kesimpulan bahwa forum yang dibentuk sebelumnya tidak mengakar dalam masyarakat. Forum tersebut terkesan hanya merupakan pertemuan para tokoh agama dan para pejabat. Karena itu efektifitas pembinaan kerukunan umat beragama tidak maksimal. Berdasarkan pengalaman-pengalaman tersebut maka patutlah kita mencari suatu model pembinaan kerukunan antar umat beragama yang lain. Dewasa ini sudah saatnya untuk lebih memperhatikan inisiatif-inisiatif masyarakat sebagai upaya pengembangan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan bangsa termasuk pembinaan kerukunan antar umat beragama. Karena itu forum-forum, organisasi-organisasi bahkan lembaga-lembaga dan semacamnya yang muncul dari masyarakat seyogyanya didukung dan bahkan dikembangkan baik pembinaannya maupun kuantitasnya (Wawancara, 4 Maret 2006)

Pendeta Jhon Ruhulessin menyatakan bahwa kami tidak menolak pembentukan FKKAUB. Akan tetapi saat ini, kita sangat membutuhkan suatu inisiatif yang muncul dari masyarakat dalam upaya memulihkan

kondisi Ambon. Proses-proses keberagaman tidak bisa dilihat sebagai sebuah proses struktural (yang dipaksakan dari atas). Proses struktural itu penting akan tetapi proses-proses membangun masyarakat yang aman, harmonis dan damai yang tumbuh dari bawah *(buttom up)* itu pun perlu dijalankan. Agama tidak bisa didekati dengan pendekatan kekuasaan. Proses-proses bersama dalam membangun bangsa harus tumbuh dari bawah. Itu tidak berarti bahwa forum antar agama yang dibentuk oleh pemerintah itu tidak penting. Forum semacam itu juga penting.

Walaupun kegiatan-kegiatan FKKAUB berjalan dengan berbagai macam pertemuan-pertemuan, dialog-dialog dan seminar-seminar antar tokoh agama. Akan tetapi kita tidak membutuhkan pertemuan-pertemauan sejenak yang membicarakan berbagai permasalahan bangsa yang berkaitan dengan kehidupan beragama, lalu setelah pertemuan itu, selesai pula kegiatan itu. Kalau kita ingin membangun sebuah format kehidupan beragama, maka upaya yang harus dilakukan adalah membangun sejarah yang bersifat transformatif, agar proses-proses dialog antar umat beragama tampak dalam tataran kehidupan masyarakat (Wawancara, 7 Maret 2006)

Mgr PC. Mandagi Msc memberikan masukan kepada Kanwil Dep. Agama dalam suatu pertemuan saat rencana pembetukan FKKAUB. Beliau menyatakan bahwa forum tersebut sebaiknya tidak usah dibentuk, karena hal tersebut terkesan dipaksakan *(top down)*, lebih baik pemerintah dalam hal ini Dep. Agama mendukung pendirian (el AI eM) sebagai lembaga kerukunan yang muncul secara *buttom up* (Wawancara, 8 Maret 2006)

FKKAUB tidak jalan sebagai mana mestinya. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab. Antara lain adalah program-program forum tampaknya diinisiasi oleh pemerintah. Sejak pembentukannya pada tahun 2003, sebagian besar kegiatan-kegiatan pertemuan yang dilakukan oleh forum, diprogramkan oleh pemerintah. Dan kegiatan itu hanya intensif pada tahun-tahun awal. Sedangkan dua tahun terakhir ini kegiatan forum tampak tidak jalan. Keadaan ini diakui sendiri oleh Kepala Bidang Humas Kanwil Dep. Agama, bahwa Kanwil Dep. Agama baru dalam proses pembuatan Rencana Kerja secara umum termasuk dalam kegiatan pembinaan kerukunan antar umat beragama. Hal ini disebabkan oleh karena pengaruh akibat konflik sampai saat ini masih terasa. Sebagian besar fasilitas sarana dan prasarana kantor baik gedung, mobiler dan arsip-arsip perkantoran sementara dibenahi. (Wawancara, 9 Maret 2006)

Sebab yang lain adalah berkurangnya koordinasi antara Kanwil Agama dengan pengurus-pengurus FKKAUB. Keadaan ini dirasakan oleh pejabat

.lama Bidang Humas Kanwil Dep. Agama. Ia menyatakan bahwa setelah ia dialihtugaskan dari Bidang Humas ke Bidang Urais tampak terasa kegiatan-kegiatan yang berkaitan kerukunan hidup umat beragama kurang dikomunikasikan kepada unsur ketua-ketua FKKUAB (Wawancara, 8 Maret 2006)

B.l. Sejarah dan Proses Berdirinya Lembaga Antar Iman dan Kemanusiaan Maluku (el AI eM)

Ada tiga orang yang berinisiatif pembentukan lembaga ini yaitu Jecky Manuputty (Kristen), Sven Loupattty (LSM), dan Zakiyah Salam (Islam). Lembaga Antar Iman untuk Kemausiaan Maluku (El AI Em) telah diinisiasi secara tertutup sejak tahun 2000, hal ini disebabkan karena eskalasi konflik bernuansa agama masih cukup tegang. Ketiga penginisiatif menghubungi beberapa tokoh agama dari berbagai jenis agama terutama penganut agama yang nota bene terlibat konflik — Ketua Sinode Gereja Protestan Maluku, Ketua Majelis Ulama Indonesia Maluku dan Uskup Amboni — dengan tujuan untuk mensosialisasikan gagasan-gagasan mereka.

Setelah mendapatkan restu dari beberapa tokoh agama itu, maka dilakukan pertemuan tertutup. Pertemuan saat itu dihadiri oleh beberapa tokoh agama,.Tokoh-tokoh agama itu berasal dari Sinode GPM, MUI Maluku dan Keusupan Ambonia. Beberapa yang hadir saat itu adalah Nazir Rahwarin, Hasan Pelu, Usman Thalib dan Husain Toisuta dari unsur MUI; Pendeta I.W.J. Hendriks, John Ruhulessin, Jacky Manuputty, Sven Loupatty dari unsur Kristen Protestan (Sinode GPM); Prodian dan Tosimon (Sekretaris Keuskupan) dari Keuskupan Ambonia. Hasil pertemuan tersebut adalah kesepakatan untuk membentukan suatu lembaga antar iman.

Pendeta DR.T.W.J. Hendriks, mengambarkan kesadaran masyarakat Ambon tentang akibat konflik Menurutnya, bahwa proses-porses konflik yang terjadi belakang ini, terutama di Kota Ambon, semakin meyakinkan kita bahwa kondisi konflik tidak mendatangkan manfaat, bahkan banyak merugikan. Semua pihak, baik penganut agama Islam, Kristen maupun Katolik menyadari bahwa satu-satunya alternatif pemecahan adalah duduk bersama membangun kesepakatan. Keragaman dalam beragama dan komunikasi yang harmonis merupakan kebanggaan masayarakat Maluku sejak lama. Karena itu proses-proses dialog dan kerjasama menjadi suatu yang dibutuhkan (Wawancara, 6 Maret 2006).

yang telibat hanya 27 orang. 13 diantaranya sebagai Pendiri dan *Board Members* sedangkan selebihnya sebagai staf organisasi.

Visi el AI eM adalah "Kualitas kehidupan sosial, kultural dan ekonomi masyarakat yang tinggi sebagai manifestasi dari ketahanan masyarakat beragama di Maluku."

Berdasarkan visi tersebut diatas maka disusun misi. Misi El AI Em adalah :

1. Mengorganisir, membina, memberdayakan dan mengembangkan kapasitas ketahanan iman, ekonomi, dan sosial budaya umat beragama, sehingga umat beragama berpartisipasi secara mandiri dalam membangun masyarakat Maluku yang sesuai dengan cita-cita pembangunan nasional.
2. Memperjuangkan dan meningkatkan terwujudnya kualitas manusia Indonesia seutuhnya dalam perspektif nilai-nilai Pancasila.
3. Mendinamisir terwujudnya interaksi fungsional, positif, kreatif, dan konstruktif, antar umat beragama.

Visi dan tersebut di atas diperbaharui pada saat penyusunan Rencana Keja 2005-2010 beserta Tujuan.Visi baru el AI eM adalah "Terwujudnya masyarakat Maluku multikulturalis yang religius, sejahtera dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang utuh"

Misi Baru adalah :

1. Membangun apresiasi masyarakat tentang keberagamaan
2. Mengupayakan tereduksinya berbagai potensi konflik serta mendorong penguatan potensi integrasi di berbagai aspek.

Sedangkan tujannya adalah

1. Terbangunnya pengakuan dan penghargaan masyarakat terhadap keberagaman sebagai realitas kehidupan yang manusiawi
2. Tereduksinya berbagai potensi konflik serta menguatnya potensi-potensi integrasi di berbagai aspek kehidupan masyarakat

B.3. Aktivitas Lembaga Antar Iman untuk Kemanusiaan Maluku

el AI eM mempunyai 3 tugas yaitu : advokasi kebijakan; membangun jejaring; dan penguatan/pemberdayaan masyarakat. Dari ketiga tugas ini disusun beberapa fungsi.

Pada tugas advokasi kebijakan, beberapa fungsinya adalah:

a. Konsolidasi informasi melalui studi-tudi kebijakan dan konteks.
b. Membangun opini publik melalui sosialisasi, kampanye dan debat publik.
c. Perumusan draft akademik yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan publik.
d. *Lobby* dan negosiasi

Fungsi-fungsi dari tugas kedua, mambangun jejeraing, adalah:

a. Membangun *support* sistem untuk pelayanan masyarakat.
b. Membangun sinergitas pengelolaan isu dan strategi pemberdayaan masyarakat.
c. Meningkatkan kapasitas teknik pelayanan jejaring
d. Fund raising.

Sedangkan fungsi tugas ketiga, penguatan/pemberdayaan masyarakat, adalah: a. Pendampingan, b. Konsultasi, c. Konsolidasi, d. Mediasi, e. Negosiasi, f. Edukasi, dan g. Fasilitasi

Di awal kegiatannya, pengurus el AI eM mengkomunikasikan program-programnya kepada beberapa instansi pemerintah maupun lembaga nirlaba nasional maupun intemasional. Pertama kali pengurus mengkomunikasikan program-programnya kepada Gubernur Maluku. Ia pun mendapat dukungan dana namun tidak maksimal. Beberapa instansi pemeritaah maupun swasta yang dihubunginya guna mendukung kegiatan-kegiatan el AI eM. Diantara mereka ada yang memberikan harapan ada pula yang tidak. Akhirnya pengurus mendapatkan dana kegiatan selama setahun dari UNDP. UNDP merupakan lembaga nirlaba intemasional yang mendukung kegiatan-kegiatan el AI eM pada tahun pertama, tahun 2003-2004.

B.4. Deskripsi Kegiatan pada Tahun Program 2003-2004

Berdasarkan orientasi pelaksanaan, maka program el AI eM mengarah pada ddua aspek penguatan, yaitu penguatan kapasitas kelembagaan dan pengembangan kapasitas pengelolaan program secara internal dan eksternal.

a. Penguatan kapasitas kelembagaan.

Orientasi pada aspek ini dijabarkan dalam empat kegiatan utama masing-masing: Pengadaan lembaga dengan kelengkapan infra-struktumya; Pengadaan rencana strategi pengembangan lembaga dan program;

Pengadaan sistem *data base* dan informasi yang dikelola lembaga untuk masyarakat luas; *Monitoring,* Evaluasi Pelaporan, dan Audit. Keempat program ini secara garis besarnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a.l. Pengadaan lembaga dan kelengkapan infra-struktur

Adanya lembaga secara struktral maupun fisik (bangunan dan infra-struktur) merupakan prasyarat primer, untuk mengintegrasikan proses pembelajaran pluralitas melalui berbagai program pada sebuah wilayah yang terpusat. Dalam kaitan ini bentuk dan komposisi struktur kelembagaan el AI eM diarahkan untuk secara berimbang mengelola program lembaga, dan melayani program publik dengan memenuhi beberapa prinsip pengembangan kemajemukan. Sementara itu pengadaan bangunan fisik yang difungsikan sebagai kantor serta infra-strukturnya menjadi salah satu indikator utama, untuk menilai kinerja dan kapasitas lembaga dalam mengelola dan melayani program. Bangunan kantor sebagai pusat pembelajaran pluralitas sedapat mungkin akan ditempatkan pada wilayah yang dapat diakses oleh semua pihak, dengan tentunya memperhatikan standar-standar pengamanan yang berlaku umum. Sampai saat bangunan kantor yang permanen belum dimiliki oleh el AI eM. Kantor saat ini yang saat ini dipakai adalah sebuah rumah yang disewa di Jl. Puncak Bogor, Ambon.

b.2. Penyusunan program dan strategi pengembangannya

Penyusunan program dan strategi pengembangannya merupakan target prioritas kelembagaan, dalam posisinya sebagai lembaga yang baru dibentuk. Untuk itu penyusunan program dan rencana strategis pengembangan program dan kelembagaan telah dilakukan melalui sebuah lokakarya awal. Lokakarya dimaksud selain menghadirkan berbagai segmen masyarakat, juga mengikutsertakan dua orang pembanding dari lembaga antar agama di luar Maluku. Kehadiran mereka dapat memberi bandingan pengalaman dalam pengelolaan lembaga sejenis, sekaligus membuka *network* di antara lembaga-lembaga antar agama yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Masing-masing mereka berasal dari lembaga Dian/Interfidei Yogya dan ICRP Jakarta. Lokakarya telah menghasilkan strategi pengembangan lembaga dan program untuk periode tiga tahunan. Terutama untuk menterjemahkan maksud menjadikan lembaga sebagai pusat pembelajaran pluralitas, yang memiliki kapasitas untuk melayani dirinya maupun publik di Maluku.

a.3. Pengadaan sistem *data base* dan informasi

Dalam mendesign proses kelembagaan, *data base* sistem dan informasi merupakan nadi yang mendasari dinamika internal maupun eksternal lembaga. Karena itu *design data base* serta informasi dan pengelolalannya membutuhkan kapasitas staf yang terukur. Darinya diharapkan kemampuan untuk mengakomodir kebutuhan publik terhadap informasi-informasi khusus, maupun pengelolaan dan penataan berbagai sumber data kelembagaan untuk kebutuhan *design* program dan pengembangan. Untuk maksud ini maka pelatihan staf lembaga menjadi hal yang *urgent* dalam item kegiatan. Selain itu pengadaan infra-struktur yang secara khusus dialokasikan untuk melayani pengelolaan sistem *data base* dan informasi merupakan urgensi lainnya yang sama paralel, mengingat dibutuhkannya kapasitas infra-struktur dengan spesifikasi khusus. Selain *data base* maka sistem informasi diarahkan sepenuhnya untuk melayani kebutuhan publik. Terutama dalam upaya untuk menjadikan lembaga sebagai *clearing house* bagi isu-isu tertentu. Serta mendiseminasikan berbagai kegiatan kelembagaan dan membangun opini publik terhadap berbagai isu kebersamaan dan pluralitas. Beberapa item kegiatan yang dialokasikan untuk memenuhi tujuan ini di antaranya; pengadaan 500 judul buku berkaitan dengan isu-isu percakapan tematis berkala; penerbitan *journal/newsletter* yang menginformasikan kegiatan-kegiatan lembaga maupun masyarakat; Publikasi bulanan opini-opini perdamaian dan pluralitas melalui berbagai media lokal; Publikasi poster, *sticker, & liflet,* yang berkaitan dengan tema-tema yang dibahas dalam percakapan tematis berkala.

a.4. Monitong, Evaluasi, Pelaporan, dan Audit

Dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas lembaga maka proses monitoring, evaluasi, dan pelaporan merupakan elemen-elemen prinsip yang wajib dipenuhi. Dalam posisi sebagai lembaga yang baru dibentuk maka kegiatan pelatihan berkaitan dengan pengembangan kapasitas staf untuk mengelola proses monitoring, evaluasi, dan pelaporan menjadi *urgent* dilakukan sejak awal. Dengan demikian diharapkan tercapainya tingkatan kapasitas staf untuk mengakomodir standar baku monitoring, evaluasi, dan pelaporan, berkaitan dengan akuntabilitas lembaga terhadap *funding.* Selain kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan, maka kegiatan audit juga merupakan salah satu indikator utama untuk mengukur kapasitas lembaga dalam pengelolaan program dan mekanisme kelembagaan. Mengingat minimnya *acountan* publik yang memiliki sertifikat, serta mempertimbangkan objektifitas penilaian, maka kegiatan *auditing*

kelembagaan dilakukan dengan mendatangkan tenaga *acountant* publik dari luar Maluku.

b. Pengembangan kapasitas pengelolaan program secara internal dan eksternal

Orientasi kegiatan el AI eM pada aspek ini dijabarkan pada empat kegiatan utama, masing-masing; Diskusi dan debat tematis berkala; Trauma *Counselling;* Trauma *Healing;* dan Siraman rohani. Masing-masing kegiatan secara garis besarnya dapat digambarkan sebagai berikut:

b.l. Diskusi dan Debat Tematis Berkala

Diskusi dan debat tematis berkala berkaitan dengan pandangan dan posisi agama-agama terhadap kurang lebih delapan isu pokok yang selama ini cenderung menempati wacana publik secara dominan. Masing-masing ; Pluralitas, Perdamaian, Kekerasan, Kebudayaan, HAM, Politik, Pendidikan, dan Hukum. Dalam pelaksanaannya ke-8 isu ini diarahkan untuk dibicarakan pada beberapa segmen masyarakat pemeluk agama, di antaranya; Anak, Perempuan, Pemuda, Tokoh Agama, Akademisi/Pendidik, Politisi, dan Jurnalis. Setiap tema dibicarakan secara bergilir pada pilihan segmen. Sementara bentuk penyajian akan diarahkan pada berbagai model, diantaranya; diskusi, debat, seminar, dialog interaktif dengan memanfaatkan media radio, tv lokal, dan media-media peribadahan umat dalam skala terbatas (taman pengajian, Ibadah Pemuda, dll). Dialog ini bertujuan untuk membangun persepsi bersama terhadap isu kontemporer dalam masyarakat. Selain percakapan-percakapan tematis ini diarahkan untuk mencapai kesepahaman bersama guna menopang proses saling percaya dan menerima, maka muatan-muatan percakapan juga dijadikan referensi kajian dan publikasi melalui media lembaga maupun media umum.

b.2. Trauma *Counselling*

Kegiatan ini diarahkan untuk mendorong dan mendinamisir proses-proses bersama yang telah berlangsung selama ini melalui lembaga-lembaga bercirikan agama di tengah masyarakat. Kegiatan trauma *counselling* bagi korban stres pasca trauma merupakan rangkaian kegiatan yang diprakarsai oleh Crisis Center Gerej a Protestan Maluku terhadap komunitas Kristen (Protestan dan Katolik) dan Muslim pada beberapa wilayah di Maluku (Pulau Ambon dan Masohi). Melalui kegiatan ini telah terbentuk beberapa kelompok *counsellor* (di Ambon terbentuk tiga kelompok/24 *counsellor)* yang melaksanakan pendampingan rutin terhadap kelompok masyarakat

basis. Untuk mendukung dan mendinamisir pelaksanaan pendampingan publik melalui kelompok *counsellor,* maka melalui lembaga dialokasikan kegiatan yang sifatnya menopang dan meningkatkan kinerja dan kapasitas para *counsellor* dimaksud. Baik berupa lokakarya penyusunan modul, maupun bantuan dana bagi pengadaan *tools* dan insentif.

b.3. Trauma *Healing*

Sebagaimana kegiatan trauma *counselling,* maka kegiatan trauma *healing* juga merupakan upaya kerjasama yang dilakukan lembaga dengan Yayasan Kasih Mandiri, salah satu yayasan dibawah naungan Keuskupan Ambonia. Melalui yayasan ini telah diprakarsai rangkaian kegiatan trauma *healing* dan *peace* education, yang diantaranya menghasilkan 12 orang tenaga *trainers* dari komunitas Kristen dan Muslim yang bekerja bersama di wilayah pulau Ambon. Untuk mengembangkan dinamika dan kinerja tenaga *trainers* yang telah terbentuk, maka melalui lembaga dialokasikan beberapa kegiatan yang kurang lebih paralel dengan kegiatan pada trauma *counselling.* Di antaranya; pertemuan evaluasi berkala, lokakarya penyusunan modul, pengadaan tools dan insentif bagi *trainers.* Kegiatan-kegitan ini di peruntukkan kepada tenaga-tenaga *trainers* yang telah memiliki basis di masyarakat, misalnya guru-guru taman pengajian bersama-sama dengan guru-guru sekolah minggu dari Protestan dan para tokoh-tokoh pendamping dalam masyarakat. Mereka dilatih bagaimana mendampingi kondisi trauma masyarakat. Mereka pun mempunyai wadah pertemuan bersama bulanan untuk membicarakan penanganan-penanganan yang dilakukan. Dalam pertemuan itu mereka mendialogkan bagaimana modul lokal, kasus-kasus seperti apa yang menonjol, bagaimana kasus-kasus tersebut ditangani. Kegiatan-kegiatan ini dilakukan dengan bekerjasama dengan Fakultas Psikologi Unpati sebagai psikolog dan dan Rumah Sakit Jiwa Ambon sebagai psikiater.

bASiraman Rohani

Kegiatan siraman rohani (khotbah damai) dilakukan lembaga dalam kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) wilayah Maluku. Dalam bentuknya kegiatan ini berupaya untuk mengintegrasikan *tools peace education* dalam pola pemberitaan dakwah dan khotbah ulama (Muslim dan Kristen). Kegitan ini semacam pertemuan tokoh-tokoh agama (pendeta pastor khatib dan tokoh pemuda) untuk membicarakan isu-isu kontemporer yang berkembang dalam masyarakat. Pertemuan berkala sekali sebulan tersebut dilakukan dengan upaya untuk memberikan bekal kepada para penganjur agama tersebut materi-materi pluralitas dan perdamaian.

e. Pada bidang isue ke empat, isu politik, terdapat tiga isu strategi. Ketiga isue strategi tersebut adalah: proses Pilkada di berbagai tempat bermasalah, terbatasnya kemampuan tokoh politik di legislatif, dan rendahnya keberpihakan para elite politik pada kepentingan masyarakat umum. (Masing-masing isu straregi pada setiap bidan isu, telah tersusun beberapa kegiatan. Jenis-jenis kegitan tersebut dapat ditelusuri pada lampiran 1) (Renstra, el AI eM).

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2005-2006. Kegiatan-kegiatan yang tekah dilakukan bidang isu Agama dan Hukum antar lain adalah Serial *Workshop* pengembangan kurikulum pengajaran tentang keberagaman untuk beberapa level kelompok status masyarakat, Penyusunan dan pencetakan kurikulum tentang keberagaman yang akan diterapkan pada beberapa level kelompok status masyarakat. Selain itu, diskusi-diskusi berkala tentang keberagamaan oleh tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai kelompok etnis dalam simpul, pentas-pentas budaya dalam tatanan agama dan pentas-pentas budaya bersama dengan partisipan dari berbagai kelompok etnis pun telah dilakukan.

Pada bidang isu hukum beberapa kegiatan pun telah dilakukan. Kegiatan-kegiatan tersebut antar lain Serial Diskusi Sosialisasi HAM bagi Pelajar dan Masyarakat, Serial Diskusi Sosialisasi Perda Provinsi dan Perda Kota Ambon bagi Pelajar dan Masyarakat, Serial Diskusi Sosialisasi dampak Narkoba, Judi dan Seks Bebas bagi Pelajar dan Masyarakat, dan Pembuatan media kampanye berupa brosur, poster, stiker, iklan layanan masyarakat untuk peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum. Temasuk pula Penebitan Jurnal el AI eM, Kanjoli, Memantapkan jalan Solidaritan Iman. Jumal yang terbit sekali dalam tiga bulan tersebut mengangkat kajian-kajian tentang pluralisme dalam beragama, HAM, budaya, pendidikan, jender, dan demokratisasi.

Yang jelas peran el AI eM selama ini cukup efektif. Kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk membawa masyarakat Maluku memahami kondisi sosial kulturnya cukup dirasakan. Kondisi kultur yang multireligi dan multi etnik merupakan kenyataan sosial dan budaya masyarakat Maluku sehingga membutuhkan suatu pemahaman bersama bahwa semua segmen masyarakat adalah memiliki hak dan kewajiban sosial. Hak untuk keyakinan keagamaan, eksistensi etnik, dihargai, dihormati, pelayanan sosial, pelayanan hukum, mendapatkan pendidikan, menikmati budaya dan lain-lain. Demikian halnya dengan kewajiban untuk mengakui keberadaan keyakinan agama, eksistensi etnik, harkat, saudara-saudara penganut agama atau etnik lain.

6. Mekanisme Kerja el AI eM

Semua kegiatan yang dilakukan oleh el AI eM selalu melibatkan lembaga-lembaga mitra. Beberapa relasi kerja el AI eM dalam melakukan aktivitasnya mulai dari level intenasional, nasional, dan lokal. Organisasi-organisasi nirlaba tingkat nasional yang selama ini menjadi pendukung utama el AI eM adalah UNDP. Beberapa organisasi nirlaba yang lain adalah UMCW, APPIT, LESMU, Crisis Center GPM, MUI, Interfidei Jogja, WCRP *(World Council Religions for Peace),* CSW & IICOR, Sofei, DPD (Dewan Perwakilan Daerah) Indonesia Timur, Baku Bae Movemen, YAP-Maluku, Yayasan Hualopu, Forum Kemanusiaan Indonesia, GPP (Gerakan Perempuan Peduli), JTMM (Jaringan Tabaos Mahina Maluku), JPA (Jaringan Pemerhati Anak), GMKI, HMI, LSM-LSM di Maluku.

Kegiatan Workshop Anak dengan Tema Anak Dalam Proses Rekonsoliasi, menajerial pelaksanan kegitan ini diserahkan kepada Lembaga Jaringan Pemerhati Anak. Bulan Juli 2005 kegiatan *The Summit of Asian Religious Youth Leaders* dilakukan dengan bekerjasama denan WCRP dan Interfidei. Diskusi tematik mengenai HAM, Politik, Jender, Kekerasan, Agama dan Budaya melibatkan berbagai organisasi pemuda, sosial keagamaan. Selain itu kegiatan semacam trauma *konseling* dan trama *healing* terhadap anak-anak dan perempuan akibat dampak kekerasan konflik pun dilakukan dengan menyerahkan pengelolaan kegitan ini kepada Crisis Center Gereja Protestan Maluku.

D. Peran Pihak Lain terhadap Kegiatan el AI eM.

Beberapa pihak yang mengambil peranan dalam kegiatan el AI eM. Pihak yang mengambil peranan yang dimaksud adalah pemerintah, tokoh agama dan tokoh masyarakat dan lembaga keagamaan. Pihak pemerintah dalam hal ini Pemda Tingkat I Maluku, Pemda Tingkat II Ambon, Kanwil Dep. Agama Maluku dan Kandep Dep. Agama Ambon. Sedangkan tokoh agama yang dimaksud adalah para ulama, pendeta dan uskup, dan lembaga-lembaga keagamaan adalah MUI, GPK Sinode dan Keuskupan Ambonia. Serta bebeberapa lembaga-lemabaga sosial lainnya.

Keterlibatan pemerintah dalam kegiatan-kegiatan el AI eM berupa keterlibatan pasif. Pemerintah dalam hal ini berada pada memberikan dukungan, saran dan dukungan dana terhadap beberapa kegiatan el AI eM. Dukungan yang dimaksud adalah berupa respon positif terhadap mulai pembetukan lembaga ini sampai pada kegiatan-kegiatan sosial keagamaan,

seperti pada kegiatan workshop, diskusi, temu tokoh agama, temu pemuda. Pemda dalam hal ini diundang untuk terlibat sebagai nara sumber pada kegiatan-kegiatan semacam itu. Demikian halnya dengan Dep. Agama, Kanwil Depag dan Kendep Depag. Selain itu pada tahun anggaran 2006 el AI eM diminta untuk memasukkan program kerja beserta rincian anggarannya kepada pemerintah agar dapat diagendakan untuk mendapatkan anggaran.

Saran dari tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat pun dibutuhkan oleh el AI eM. Saran tersebut dibutuhkan oleh el AI eM dalam hal menyusun agenda kegiatan. Hal ini dirasakan perlu oleh el AI eM, sebab lembaga ini merupakan manifesitasi dari keinginan masyarakat. Karena itu semua program yang direncanakan harus berbasis *buttom up.* Upaya menggali kebutuhan-kebutahan masyarakat dilakukan dengan mengadakan sebuah diskusi penyusunan rencana strategis atau *Strategi Planning Discussion.* Kegaitan ini dihadiri dari berbagai segmen masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemeritah, pemuda, dan kelompok-kelompok profesi lainya yang ada di Maluku.

Tidak hanya itu, akan tetapi dalam aplikasi rencana strategi itu para tokoh tersebut dilibatkan. Ketelibatan mereka dapat berupa sebagai nara sumber, peserta, panitia penyelenggara bahkan sasaran kegiatan.

Lembanga-lembaga keagaman yang ikut aktif dalam mendesain beberapa kegiatan el AI eM adalah MUI, GPK Sinode dan Keuskupan Amboni. Ketiga lembaga agama ini memang mendapat tanggungjawab penuh dalam segala kegiatan el AI eM. Hal ini disebabkan oleh karena ketiga lembaga tersebut merupakan unsur pendiri el AI eM. Person lembaga-lembaga tersebut pun termasuk sebagai *Board Members.*

E. M anfaat Lembaga bagi Umat Bearagama

Program awal dari el AI eM adalah difokuskan kepada membangun persepsi bersama terhadap kondisi sosio kultural Ambon. Kondisi sosio kultural tersebut berupa multi etnik, mullti religi, segregasi permukiman menurut etnik dan agama, dan bahkan status sosial, kahancuran material dan trauma masyarakat akibat dampak konflik, dan lain-lain. Karena itu tujuan dari merangkai kegiatan yang dilakukan oleh el AI eM adalah membangu kesadaran bersama terhadap permasalahan sosial yang dialami selama ini.

Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari serangkaian program yang telah diuraikan sebelumnya adalah antara lain:

1. Terbangun persepi, tanggung jawab, kesadaran bersama terhadap permasalahan yang dihadapi akibat dampak konflik. Setiap segmen masyarakat merasakan terbangunnya persepsi bersama ini. Hal ini disebebabkan karena intensitas kegiatan-kegiatan dialog antar berbagai segmen masyarakat dalam membangun persepsi tersebut dalam alam sosio kultural Maluku.
2. Terbangun kesadaran bahwa konflik yang terjadi di Maluku disebabkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oknum-oknum tersebut yang memprofokasi masyarakat dengan berbagai cara agar kerukunan hidup bermasyarakat dan beragama di Maluku terusik bahkan sirna. Kesadaran tersebut dapat dibuktikan dengan masyarakat tidak lagi mudah terpancing oleh profokasi-profokasi konflik serupa. Terdapat beberapa kasus yang muncul di masyarakat yang bila diperhatikan kasus-kasus tersebut sangat memungkinkan berakibat kepada munculnya kembali kerusuhan serupa sebelumnya. Misalnya masyarakat telah menemukan sebuah selebaran yang isinya mendiskeriditkan suatu agama tertentu. Selebaran tersebut sangat memungkinkan untuk memancing emosi massa penganut agama tertentu, akan tetapi hal itu tidak terjadi. Yang terjadi kemudian adalah masyarakat yang menemukan selebaran tersebut menyampaikan kepada Ketua MUI. Selain itu respon masyarakat Islam sedunia akibat pemuatan karikatur Nabi Muhammad dalam Harian Pagi di Denmark, Jyllaands Posten, tidak terjadi di Kota Ambon. Ketika itu dua pendiri el AI eM yaitu Ketua GPK Sinode dan Uskup Diosis Ambonia mendatangi Ketua MUI untuk menyampaikan permohonan maaf dari penganut agama Nasrani akibat oknom pembuat karikatur tersebut. Ketiga pemimpin umat ini pun melakukan konferensi pers dengan menyatakan pengecaman terhadap perbuatan tidak agamis oknom tersebut.
3. Kasus terakhir, ketika penelitian ini berlangsung, konflik antar oknum Kepolisian dan TNI yang mengkibatkan salah seorang mahasiswa Muslim terkena peluru salah sasaran. Kasus ini tidak kemudian menyulut benih-benih konflik.

V. PENUTUP

1. Lembaga Antar Imam dan Kemanusiaan Maluku (el AI eM) merupakan suatu lembaga kerukunan antar umat beragama yang eksis di masyarakat Ambon. Lembaga ini disamping didukung oleh pemeritah setempat dengan keluarnya Surat Keputusan Gubernur Maluku tentang pendiriannya No. 266 Tahun 2003, juga didukung oleh para tokoh agama dan masyarakat. el AI eM adalag lembaga yang muncul secara *bottom up,* merupakan hasil inisiatif dari tokoh pemuda dan tokoh agama. Tokoh pemuda dari dua penganut agama yang *nota bene* terlibat konflik di Maluku sejak tahun 1998. Demikian halnya dengan tokoh agama, Ketua MUI, Ketua GPM Sinode Ambon dan Uskup Disis Ambonia merupakan unsur-unsur penginisiatif munculnya lembaga tersebut sekaligus sebagai pendiri lembaga. Sedangkan Forum Kominuksi Kerukunan Antar Umat Beragama (FKKAUB), yang dibentuk secara *top dawn* oleh pemerintah, tampak saat ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pada tahun-tahun pertama pembentukannya tahun 2003, kegitan-kegiatan forum ini memang tampak, seperti beberapa pertemuan dan dialog antara tokoh-tokoh agama se Maluku atau se Ambon. Namun akhir-akhir ini kegiatan-kegiatan forum tersebut kurang tampak lagi. Hal ini disebabkan karena penginisiatif dan pelaksanaan kegiatan lembaga ini di banyak-banyak berasal dari pemerintah, Kanw[:i] Departemen Agama. Sedangkan pengurus forum kurang terlibat aalam hal tersebut. Tampaknya para tokoh masyarakat dan tokoh agama menghendaki adanya lembaga kerukunan yang tumbuh dari masyarakat, dengan alasan bahwa forum semacam FKKAUB sudah ada sebelum konflik melanda Ambon, dan banyak sekali dana yang dipergunakan dalam pencapai tujuan yaitu kerukunan antar umat beragama. Akan tertapi setelah konflik bernuansa agama muncul di Ambon, sepertinya kegiatan-kegiatan forum selama sebelum konflik tidak berbekas. Masyarakat dengan mudahnya bersikap anarkis terhadap penganut agama lain, bahkan saling menyerang.

2. Kegiatan el AI eM menyentuh aspek sosial budaya masyarakat yang real. Kegitan-kegiatan tersebut menyangkut kebutuhan dasar masyarakat Ambon dalam pemulihan kondisi yang stabil. Pada tahun

Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari serangkaian program yang telah diuraikan sebelumnya adalah antara lain:

1. Terbangun persepi, tanggung jawab, kesadaran bersama terhadap permasalahan yang dihadapi akibat dampak konflik. Setiap segmen masyarakat merasakan terbangunnya persepsi bersama ini. Hal ini disebebabkan karena intensitas kegiatan-kegiatan dialog antar berbagai segmen masyarakat dalam membangun persepsi tersebut dalam alam sosio kultural Maluku.
2. Terbangun kesadaran bahwa konflik yang terjadi di Maluku disebabkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oknum-oknum tersebut yang memprofokasi masyarakat dengan berbagai cara agar kerukunan hidup bermasyarakat dan beragama di Maluku terusik bahkan sirna. Kesadaran tersebut dapat dibuktikan dengan masyarakat tidak lagi mudah terpancing oleh profokasi-profokasi konflik serupa. Terdapat beberapa kasus yang muncul di masyarakat yang bila diperhatikan kasus-kasus tersebut sangat memungkinkan berakibat kepada munculnya kembali kerusuhan serupa sebelumnya. Misalnya masyarakat telah menemukan sebuah selebaran yang isinya mendiskeriditkan suatu agama tertentu. Selebaran tersebut sangat memungkinkan untuk memancing emosi massa penganut agama tertentu, akan tetapi hal itu tidak terjadi. Yang terjadi kemudian adalah masyarakat yang menemukan selebaran tersebut menyampaikan kepada Ketua MUI. Selain itu respon masyarakat Islam sedunia akibat pemuatan karikatur Nabi Muhammad dalam Harian Pagi di Denmark, Jyllaands Posten, tidak terjadi di Kota Ambon. Ketika itu dua pendiri el AI eM yaitu Ketua GPK Sinode dan Uskup Diosis Ambonia mendatangi Ketua MUI untuk menyampaikan permohonan maaf dari penganut agama Nasrani akibat oknom pembuat karikatur tersebut. Ketiga pemimpin umat ini pun melakukan konferensi pers dengan menyatakan pengecaman terhadap perbuatan tidak agamis oknom tersebut.
3. Kasus terakhir, ketika penelitian ini berlangsung, konflik antar oknum Kepolisian dan TNI yang mengkibatkan salah seorang mahasiswa Muslim terkena peluru salah sasaran. Kasus ini tidak kemudian menyulut benih-benih konflik.

V. PENUTUP

1. Lembaga Antar Imam dan Kemanusiaan Maluku (el AI eM) merupakan suatu lembaga kerukunan antar umat beragama yang eksis di masyarakat Ambon. Lembaga ini disamping didukung oleh pemeritah setempat dengan keluarnya Surat Keputusan Gubernqr Maluku tentang pendiriannya No. 266 Tahun 2003, juga didukung oleh para tokoh agama dan masyarakat. el AI eM adalag lembaga yang muncul secara *bottom up,* merupakan hasil inisiatif dari tokoh pemuda dan tokoh agama. Tokoh pemuda dari dua penganut agama yang *nota bene* terlibat konflik di Maluku sejak tahun 1998. Demikian halnya dengan tokoh agama, Ketua MUI, Ketua GPM Sinode Ambon dan Uskup Disis Ambonia merupakan unsur-unsur penginisiatif munculnya lembaga tersebut sekaligus sebagai pendiri lembaga. Sedangkan Forum Kominuksi Kerukunan Antar Umat Beragama (FKKAUB), yang dibentuk secara *top dawn* oleh pemerintah, tampak saat ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pada tahun-tahun pertama pembentukannya tahun 2003, kegitan-kegiatan forum ini memang tampak, seperti beberapa pertemuan dan dialog antara tokoh-tokoh agama se Maluku atau se Ambon. Namun akhir-akhir ini kegiatan-kegiatan forum tersebut kurang tampak lagi. Hal ini disebabkan karena penginisiatif dan pelaksanaan kegiatan lembaga ini di banyak-banyak berasal dari pemerintah, Kanw[:1] Departemen Agama. Sedangkan pengurus forum kurang terlibat aalam hal tersebut. Tampaknya para tokoh masyarakat dan tokoh agama menghendaki adanya lembaga kerukunan yang tumbuh dari masyarakat, dengan alasan bahwa forum semacam FKKAUB sudah ada sebelum konflik melanda Ambon, dan banyak sekali dana yang dipergunakan dalam pencapai tujuan yaitu kerukunan antar umat beragama. Akan tertapi setelah konflik bernuansa agama muncul di Ambon, sepertinya kegiatan-kegiatan forum selama sebelum konflik tidak berbekas. Masyarakat dengan mudahnya bersikap anarkis terhadap penganut agama lain, bahkan saling menyerang.

2. Kegiatan el AI eM menyentuh aspek sosial budaya masyarakat yang real. Kegitan-kegiatan tersebut menyangkut kebutuhan dasar masyarakat Ambon dalam pemulihan kondisi yang stabil. Pada tahun

pertama kegaitan el AI eM mengarah kepada membangun persepsi bersama terhadap isu kontemporer dalam masyarakat. Kegiatannya berupa 52 serial diskusi publik terhadap delapan tema di setiap segmen masyarakat, khotbah damai, dan trauma *konseling* dan trauma *helling* dan pentas budaya. Sedangkan untuk lima tahun ke depan disusun renstra melalui suatu kegiatan *Strategi Planning Discussion,* suatu kegitan yang melibatkan semua segman masyarakat untuk menggali aspirasi masyarakat guna penyusunan program kerja. Ada lima bidang isu yang telah didentifikasi yaitu bidang isu agama dan budaya, ekonomi, pendidikan, hukum dan politik. Masing-masing kelima bidang isu tersebut dilengkapi dengan isu strategis, tujuan strategis program strategis dan kegiatan.

3. Masyarakat sangat merasakan manfaat kegiatan-kegiatan el AI eM, terutama pada pembentukan kesadaran bersama terhadap dampak konflik dan kesadaran untuk tidak cepat terpancing oleh kasus-kasus yang tampak memprofokasi munculnya konflik serupa sebelumnya.

DAFTARPUSTAKA

Lembaga Antar Iman Maluku, *Jurnal Lembaga Antar Iman Maluku,* Kanjoli, Memantapkan Jalan Solidaritas Lintas Agama, Edisi Juli-September 2005.

Lembaga Antar Iman Maluku, *Jurnal Lembaga Antar Iman Maluku,* Kanjoli, Memantapkan Jalan Solidaritas Lintas Agama, Edisi Oktober-Desember2005.

Lembaga Antar Iman Maluku, *Anggaran Dasar elAI eM,*

Lembaga Antar Iman Maluku, *Laporan Kegiatan elAI eM,* 2004-2005.

Lembaga Antar Iman Maluku, *Laporan Kegitan Strategi Planning Discussion.*

Maluku Interfaith Institution For Humanitarias, *el AI eM.,* Lembaga Antar Iman untuk Kemanusiaan, Brosur.

Kanwil Dep. Agama Maluku, *Rumusan Hasil Dialog tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Se Maluku tanggal 11-12 Agustus 2003 di Ambon,* Laporan Kegiatan.